

Implementasi Inisilite Dalam Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan Saidjah Adinda Kabupaten Lebak

Rusito¹, Nia Kurniasari²,

¹Magister Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

*
e-mail: inspektur2022@gmail.com

Abstract / Abstrak (Times New Roman, 9pt Bold)

This research aims to evaluate the implementation of inisilite in improving library services at Saidjah Adinda Library, Lebak. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through semi-structured interviews using purposive sampling. Data were analysed using data reduction, display and conclusion drawing/verification. This study used Edward III (1980) policy implementation model to evaluate the implementation of Inisilite focusing on communication, resources, disposition, and bureaucratic structures. The finding showed that the communication between library staff and visitors was established but limited to one way communication. The resources including internet connectivity, computer availability, and staff and visitor skill in Inisilite implementation was also limited. Another finding indicated that disposition or staff's behavior in Saidjah Adinda library was ineffective in handling the technical issue due to absence of effective user manual assistance. The bureaucratic structures in Inisilite implementation were still lack of consideration to digital innovation. These findings indicate that the implementation of Inisilite in Saidjah Adinda Library, Lebak, positively shifted the library toward digital services but facing significant challenges in effective policy implementation; communication, resources, disposition, and bureaucratic structures.

Keywords / Kata kunci (9pt)

Policy
Implementasi,
Inisilite,
Saidjah
Adinda
Library

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Inisilite dalam Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan Saidjah Adinda Kabupaten Lebak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling dan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori Edward III (1980) dalam Subarsono (2022:90) tentang Implementasi Kebijakan Inisilite dilihat dari empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Inisilite pada komunikasi antara pelaksana dan pemustaka sudah berjalan cukup baik namun masih bersifat satu arah. Sumberdaya implementasi inisilite masih ada keterbatasan seperti jaringan internet yang kurang stabil, perangkat komputer yang terbatas, dan keterampilan baik staf maupun pemustaka masih rendah. Disposisi atau sikap pelaksana terutama pada staf Perpustakaan Saidjah Adinda masih cenderung reaktif terhadap kendala teknis dan belum memiliki sistem pendampingan pengguna secara optimal. Struktur birokrasi dalam pengelolaan Perpustakaan Saidjah Adinda masih sederhana dan kurang mendukung optimalisasi inovasi digital. Secara keseluruhan Implementasi Inisilite di Perpustakaan Saidjah Adinda telah memberikan dampak positif awal dalam sistem otomatisasi layanan tetapi belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada tantangan struktural, sumberdaya, dan budaya organisasi.

Abstract;
Implementasi
Kebijakan,
Inisilite,
Perpustakaan
Saidjah.

DOI:

<https://doi.org/10.53611/v1g7sw10>

Article Info

Received: Maret 10, 2025

Accepted: March 20, 2025

Published: March 28, 2025

Copyright © 2025 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia.

This is an Open Access article under the CC BY 4.0 license

Introduction

Perpustakaan merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai pusat informasi dan

pengetahuan, perpustakaan tidak hanya menyediakan koleksi buku fisik, tetapi juga mendukung pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) serta meningkatkan literasi masyarakat.

Dengan kemajuan teknologi digital, peran perpustakaan semakin berkembang, terutama dalam mendukung akses informasi yang lebih luas dan cepat.

Menurut Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam peningkatan literasi. IPLM Kabupaten Lebak berada pada angka 50,26, lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten (Statistik, 2023). Selain itu, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat Kabupaten Lebak hanya mencapai 62,85, yang masih di bawah rata-rata nasional sebesar 66,77.(Nurandi, n.d.)

Dalam menghadapi tantangan ini, digitalisasi perpustakaan menjadi solusi strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya informasi. Konsep perpustakaan digital memungkinkan pengguna untuk mengakses koleksi buku elektronik, jurnal daring, serta berbagai sumber daya lainnya tanpa harus datang langsung ke perpustakaan fisik. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), perpustakaan di berbagai negara telah mulai menerapkan sistem digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan.

Menurut laporan *International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA) tahun 2023, beberapa tren utama digitalisasi perpustakaan meliputi otomasi layanan perpustakaan, penyediaan koleksi digital, peningkatan akses informasi, serta integrasi perpustakaan dengan sistem pendidikan. Beberapa perpustakaan besar dunia, seperti Library of Congress di Amerika Serikat dan British Library di Inggris, telah mengembangkan layanan perpustakaan digital dengan koleksi jutaan sumber daya elektronik. *British Library* menyediakan akses online ke 30.000 gambar dari berbagai buku abad pertengahan melalui Galeri Online-nya. Selain itu, perpustakaan ini memiliki layanan pengiriman elektronik yang aman, menawarkan lebih dari 100 juta item, termasuk 280.000 judul jurnal, 50 juta paten, 5 juta laporan, 476.000 disertasi AS,

dan 433.000 prosiding konferensi (Wilson & Long, n.d.)

Indonesia juga mulai mengikuti tren digitalisasi perpustakaan dengan menerapkan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya informasi. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) telah meluncurkan beberapa program digitalisasi, termasuk pengembangan INLISLite (*Integrated Library System Lite*) sebagai sistem otomasi perpustakaan yang dapat digunakan oleh perpustakaan umum, sekolah, dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. INLISLite pertama kali dikembangkan oleh Perpusnas pada tahun 2011 sebagai solusi untuk memfasilitasi perpustakaan di seluruh Indonesia dalam menerapkan otomasi perpustakaan menuju terwujudnya perpustakaan digital. Perangkat lunak ini dirancang untuk membantu pengelolaan koleksi, keanggotaan, sirkulasi, dan fungsi perpustakaan lainnya (Serba Serbi, n.d.) INLISLite menawarkan berbagai fitur, termasuk pengelolaan katalog, akuisisi, keanggotaan, sirkulasi, dan laporan statistik. Sistem ini juga mendukung pembentukan katalog elektronik berbasis MARC untuk Indonesia (INDOMARC) dan integrasi dengan Katalog Induk Nasional (KIN) serta Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) (Serba Serbi, n.d.)

Perpusnas mendorong penggunaan INLISLite sebagai aplikasi umum yang tersertifikasi untuk digunakan oleh semua perpustakaan di seluruh Indonesia. Hal ini sejalan dengan program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengharuskan instansi pusat dan daerah menggunakan aplikasi umum yang sama untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public (Â, n.d.).

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) telah mengembangkan aplikasi perpustakaan digital nasional bernama iPusnas. Sejak peluncurannya pada 16 Agustus 2016, iPusnas telah mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna dan koleksi buku digital. (Arifin, n.d.). Pada tahun 2018, iPusnas memiliki 59.485 judul buku dengan total 619.726 salinan buku digital, dan jumlah pengguna mencapai

368.224 (Arifin, n.d.). Pada tahun 2020, jumlah pengguna online iPusnas meningkat menjadi 3.403.469 (Linawati, n.d.). Pada tahun 2021, jumlah pengguna mencapai 15.734.566, dengan 5.466.105 pinjaman *e-book* (Indriani, n.d.).

Kabupaten Lebak, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Banten, memiliki

tantangan tersendiri dalam pengembangan layanan perpustakaan berbasis digital. Berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak, jumlah kunjungan ke Perpustakaan Saidjah Adinda dapat dilihat pada table 1.1 Kunjungan Pemustaka Berdasarkan Kategori, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kunjungan Pemustaka Berdasarkan Kategori

No	Kategori/Jenjang	Tahun			Total
		2022	2023	2024	
1	SD	9,682	16,958	16,700	43,340
2	SMP	6,552	6,620	6,337	19,509
3	SMA	3,374	3,771	4,333	11,478
4	MHS	3,280	3,074	2,710	9,064
5	GURU	587	927	965	2,479
6	PNS	140	196	211	547
7	PEGAWAI SWASTA	180	204	190	574
8	WIRASWASTA	130	133	165	428
9	LAINNYA	9,682	16,958	16,700	43,340
Jumlah		25,218	33,972	33,256	92,446

(Sumber: Data Peneliti 2025)

Data pada tabel 1.1 Kunjungan Pemustaka Berdasarkan Kategori diatas menunjukkan perkembangan jumlah individu berdasarkan kategori atau jenjang pekerjaan dan pendidikan selama tiga tahun, yaitu tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), terjadi peningkatan signifikan dari 9.682 pada tahun 2022 menjadi 16.958 pada tahun 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 16.700 pada tahun 2024. Secara keseluruhan, total jumlah untuk kategori SD mencapai 43.340 orang. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan tren yang relatif stabil, dengan jumlah 6.552 pada tahun 2022, sedikit meningkat menjadi 6.620 pada tahun 2023, namun kembali menurun ke angka 6.337 pada tahun 2024, dengan total keseluruhan 19.509. Sementara itu, jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) mengalami peningkatan bertahap dari 3.374 pada tahun 2022 menjadi 4.333 pada tahun 2024, menghasilkan total 11.478.

Kategori Mahasiswa justru menunjukkan tren penurunan, dari 3.280 pada tahun 2022 menjadi 2.710 pada tahun 2024, dengan total 9.064. Jumlah guru mengalami kenaikan cukup signifikan dari 587 pada tahun 2022 menjadi 965 pada tahun 2024, dengan total 2.479, menandakan peningkatan peran atau keterlibatan guru selama periode tersebut. Hal serupa juga terlihat pada kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang meningkat dari 140 menjadi 211 dalam tiga tahun, dengan total 547. Pegawai swasta mencatat total 574, dengan angka relatif stabil tiap tahun. Jumlah wiraswasta juga meningkat secara bertahap dari 130 menjadi 165, dengan total 428.

Kategori lainnya memiliki angka 9.682 (2022), 16.958 (2023), dan 16.700 (2024), dengan total 43.340. Secara total, jumlah individu dari seluruh kategori meningkat dari 25.218 pada 2022 menjadi 33.972 pada tahun 2023, lalu sedikit

menurun menjadi 33.256 pada 2024, dengan total keseluruhan selama tiga tahun sebesar 92.446. Data ini menunjukkan tren peningkatan partisipasi atau keterlibatan secara umum dari tahun ke tahun, meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun terakhir.

Perpustakaan Saidjah Adinda merupakan salah satu perpustakaan utama di Kabupaten Lebak yang telah menerapkan Inlislite dalam pengelolaan koleksi dan layanan peminjaman buku. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus membahas efektivitas implementasi sistem ini dalam meningkatkan akses informasi bagi masyarakat Lebak. Selain itu, masih terdapat kendala dalam penerapan digitalisasi.

Pertama yang dihadapi oleh Perpustakaan Saidjah Adinda adalah kurangnya tenaga pustakawan yang memiliki keterampilan dalam pengelolaan sistem digital, terutama dalam penggunaan aplikasi seperti Inlislite. Sistem otomatisasi perpustakaan seperti Inlislite memerlukan keterampilan khusus untuk memastikan bahwa pustakawan dapat mengelola koleksi, sirkulasi buku, serta data pemustaka secara efisien. Beberapa pustakawan di perpustakaan daerah, termasuk di Kabupaten Lebak, mungkin tidak memiliki pengetahuan teknis yang cukup mengenai penggunaan aplikasi berbasis digital, terutama karena latar belakang pendidikan atau pelatihan yang lebih fokus pada sistem manual.

Masalah ini seringkali diperburuk oleh kurangnya kesempatan pelatihan dan pendampingan. Menurut data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak, meskipun ada sejumlah pustakawan yang memiliki pendidikan di bidang perpustakaan, tidak semua dari mereka memiliki keterampilan dalam mengelola sistem komputerisasi dan perangkat lunak perpustakaan. Hal ini mengakibatkan hambatan dalam optimalisasi penggunaan Inlislite, yang seharusnya dapat meningkatkan efisiensi layanan perpustakaan. Tanpa keterampilan teknis yang memadai, pustakawan dapat menghadapi kesulitan dalam melakukan pemeliharaan sistem, *troubleshooting* masalah teknis, atau memperbarui data koleksi.

Kedua yang menjadi tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Walaupun Inlislite adalah sistem yang dirancang untuk diakses secara daring, penerapannya di beberapa daerah seperti Kabupaten Lebak menghadapi masalah infrastruktur, terutama terkait dengan akses internet yang terbatas, ketersediaan perangkat keras, dan kapasitas server yang terbatas. Pertama, akses internet yang belum merata di Kabupaten Lebak menjadi salah satu hambatan utama. Perpustakaan Saidjah Adinda, meskipun berlokasi di ibu kota kabupaten, masih menghadapi keterbatasan jaringan internet yang memadai. Banyak daerah di Kabupaten Lebak, terutama di pedesaan dan daerah terpencil, tidak memiliki konektivitas internet yang stabil. Hal ini menghambat akses pengguna ke katalog *online* (OPAC) dan layanan digital lainnya yang disediakan oleh INLISLite. Pengguna yang tidak dapat mengakses internet dengan mudah akan kesulitan untuk memanfaatkan layanan perpustakaan digital, yang dapat menyebabkan rendahnya tingkat pemanfaatan sistem Inlislite.

Ketiga yang dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pengguna perpustakaan. Meskipun Inlislite dapat mempermudah pencarian buku, peminjaman, dan akses informasi lainnya secara daring, tidak semua pengguna di Kabupaten Lebak memiliki kemampuan yang memadai untuk menggunakan sistem digital.

Keempat masalah teknis dan infrastruktur, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang manfaat digitalisasi perpustakaan menjadi kendala penting lainnya. Banyak masyarakat, terutama mereka yang belum terbiasa dengan teknologi, mungkin tidak sepenuhnya menyadari manfaat yang ditawarkan oleh sistem digital seperti Inlislite. Beberapa pemustaka mungkin merasa lebih nyaman dengan metode manual yang sudah mereka kenal, dan tidak merasa perlu untuk beralih ke sistem berbasis digital.

Selain itu, perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan Inlislite secara optimal, seperti komputer, laptop, dan server dengan kapasitas yang cukup, tidak selalu tersedia dalam jumlah yang memadai di perpustakaan. Perpustakaan Saidjah Adinda mungkin tidak memiliki cukup

perangkat komputer atau server yang dapat mendukung penggunaan sistem digital secara terus-menerus, terutama jika ada lonjakan pengunjung atau pengguna yang mengakses layanan secara bersamaan.

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi implementasi Inlislite di beberapa perpustakaan daerah di Indonesia, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi, terutama dalam konteks perpustakaan daerah dengan keterbatasan akses teknologi, seperti Kabupaten Lebak. Sebagian besar penelitian tentang Inlislite lebih banyak dilakukan di perpustakaan di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, yang memiliki infrastruktur teknologi lebih maju serta tenaga pustakawan yang lebih terampil dalam bidang digital (Indah et al., 2021; Nurulauni et al., 2022). Namun, belum ada kajian mendalam yang meneliti implementasi Inlislite di perpustakaan daerah dengan keterbatasan akses teknologi. Selain itu, belum ada penelitian yang secara spesifik mengukur hubungan antara digitalisasi perpustakaan dengan kepuasan pengguna di daerah dengan tingkat literasi rendah. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada aspek teknis (pengelolaan koleksi dan layanan peminjaman), tanpa mengeksplorasi bagaimana digitalisasi perpustakaan dapat meningkatkan minat baca dan keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan digital.

Penelitian ini memiliki beberapa aspek kebaruan yang membedakannya dari studi sebelumnya. Pertama, penelitian ini merupakan studi pertama yang membahas secara mendalam implementasi Inlislite di Perpustakaan Saidjah Adinda, Kabupaten Lebak. Kedua, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi implementasi Inlislite dari segi teknis, tetapi juga menilai dampaknya terhadap kepuasan pengguna, jumlah kunjungan perpustakaan, serta tingkat pemanfaatan koleksi digital oleh masyarakat Lebak. Ketiga, penelitian ini akan mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam penerapan sistem digitalisasi, serta memberikan rekomendasi berbasis data empiris bagi perpustakaan daerah yang ingin mengadopsi sistem otomatis serupa.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi pengelola perpustakaan, pemerintah daerah, dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan literasi digital dan optimalisasi layanan perpustakaan berbasis digital di daerah dengan keterbatasan akses teknologi.

Research Methods

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif yang dipilih untuk menggali secara mendalam faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Inlislite di Perpustakaan Saidjah Adinda, sekaligus mengidentifikasi kendala yang muncul dalam proses digitalisasi layanan perpustakaan di daerah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi. Pendekatan eksploratif penting karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menemukan persoalan-persoalan yang belum terungkap sebelumnya serta memahami konteks lokal secara lebih menyeluruh. Dalam operasionalnya, penelitian ini mengandalkan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi untuk memperoleh data primer dan sekunder yang komprehensif, sementara alat bantu seperti perekam suara, catatan lapangan, dan dokumentasi visual digunakan untuk memperkaya detail informasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan transkripsi, reduksi, koding, dan penghubungan dengan teori Edward III tentang implementasi kebijakan, yang memungkinkan peneliti menyusun interpretasi temuan secara sistematis, menguji konsistensi melalui triangulasi, serta menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai dinamika keberhasilan dan hambatan dalam penerapan Inlislite (Dewi & Sandhi, 2024).

Results and Discussion

Multatuli sudah menjadi bagian dari Sejarah Lebak, sementara itu Saidjah-Adinda sebagai drama epic dalam Max Havelaar diabadikan melalui nama Perpustakaan, taman baca Masyarakat, dan Komunitas Kesenian. Selain itu pemikiran dan karya Multatuli menetes dan diadaptasi menjadi Puisi, Film, dan Teater. Muncul ide Pendirian Museum Multatuli dan Perpustakaan Saidjah-Adinda yang sudah dimulai sejak tahun 1990 an. Ide penciptaan

it uterus berlanjut di tahun 2000 an. Tepatnya pada tahun 2009, sudah ada wacana Kembali Pendirian Museum dan Perpustakaan tetapi terealisasi pada tahun 2015.

Pada tahun 2016, delegasi pejabat dan guru Pemerintah Kabupaten Lebak berkunjung ke Belanda untuk mengunjungi Arsip Nasional Belanda dan Museum Multatuli di Amsterdam. Kunjungan tersebut bertujuan untuk membangun komunikasi dan persahabatan antar Lembaga guna keberlangsungan Museum

Multatuli dan Perpustakaan Saidjah Adinda yang sedang dirintis di Lebak. Setahun kemudian (2017) proses pengisian koleksi dan pembuatan story line museum mulai berlangsung. Terdiri dari pengadaan interior museum, film documenter, dan pengadaan patung interaktif Multatuli, Saidjah dan Adinda. Pada 11 Februari 2018 Museum Multatuli dibuka untuk umum, dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Hilmar Farid dan Bupati Lebak, Hj. Iti Octavia Jayabaya.¹

Gambar 1. Perpustakaan Saidjah Adinda



Sumber: Peneliti (2025).

Gedung Perpustakaan Saidjah Adinda dibangun pada tahun 2015-2016 dan diresmikan pada tanggal 27 Desember 2017 dan menjadi Perpustakaan Daerah terbesar di Banten. Bangunan berbentuk leuit ini terletak di sebelah Museum Multatuli dan menjadi daya Tarik anak muda di Lebak yang berkunjung ke Lebak. Bahkan, anak-anak muda di Lebak yang berkunjung ke Alun-Alun Rangkasbitung menyempatkan diri untuk selfie dengan latar Gedung Perpustakaan atau Museum Multatuli.

Lantai dasar digunakan untuk parkir dan areal perkantoran, sedangkan lantai dua digunakan untuk menyimpan koleksi ribuan judul buku. Sementara itu, lantai tiga digunakan untuk menyimpan berbagai arsip

daerah dan kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 mengamanatkan terbitnya Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Sehingga keberadaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) yang dibentuk melalui Perda Nomor 11 Tahun 2017, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 berubah menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskerpus) Kabupaten Lebak.

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas ini

¹ Mulyani Sri. 2025. *Praktik Kerja Industri Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak. Laporan*, SMKN 1 Cileles.

(Diskerpus) ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015. Salah satu amanat peraturan tersebut, Diskerpus Kabupaten Lebak mengelola Perpustakaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dengan nama “Perpustakaan Saidjah Adinda”. Namun pada Tahun 2020 Diskerpus Lebak berubah nama menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispuser) Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 30 Desember 2020, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Lebak. Ini ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2020 selain perubahan nama dan statusnya, Alamat kantor Dinas juga berpindah dari semula di Jl. Abdi Negara Nomor 3, Rangkasbitung ke Jl. R.M Nataatmaja Nomor 3, Rangkasbitung. Lokasi Dispuser Kabupaten Lebak jika dilihat di internet atau google map yaitu terlihat jelas pada gambar 4.2 Letak dan Geografis Dispuser Kabupaten Lebak yang berlokasi di Jl. R.M Nataatmaja Nomor 3, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Kode Pos 42312.

Gambar 2. Letak dan Geografis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak



Sumber: Google Map (2025).

Dengan status baru Dispuser Lebak memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan bidang kearsipan yang meliputi pengelolaan, perlindungan, penyelamatan dan perizinan di bidang kearsipan, serta kewenangan di bidang Perpustakaan meliputi pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan pelestarian naskah kuno.

Perpustakaan di Dispuser Kabupaten Lebak Bernama Perpustakaan Saidjah Adinda tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispuser) Kabupaten Lebak. Tugas Pokok yang diemban oleh Dispuser Kabupaten Lebak yaitu merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah pada bidang urusan

Perpustakaan dan kearsipan. Sedangkan Fungsi Dispuser Kabupaten Lebak ialah:

- Perumusan kebijakan teknis dalam bidang perpustakaan dan kearsipan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang perpustakaan dan kearsipan;
- Pengawasan dan pembinaan tugas bidang perpustakaan dan kearsipan;
- Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak

Visi Dispuser pada rencana strategis perubahan tahun 2024- 2028 adalah “Mewujudkan Tertib Administrasi Kearsipan Sebagai Penunjang Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah dan Memberdayakan Perpustakaan Guna Mencerdaskan Masyarakat Kabupaten Lebak”.

Untuk mencapai visi tersebut Dispusar Kabupaten Lebak memiliki tujuh misi, yaitu:

1. Menyelamatkan Arsip sebagai sumber Informasi dan bahan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang Profesional dan mandiri;
3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan Kearsipan dan mengoptimalkan pemanfaatan arsip kegiatan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat;
4. Menumbuhkembangkan budaya tertib arsip di Lingkungan Aparatur Pemerintah Kabupaten Lebak;
5. Membina, mengembangkan dan mendayagunakan Perpustakaan,
6. Meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam Informasi Ilmu Pengetahuan dan mengembangkan minat baca masyarakat;

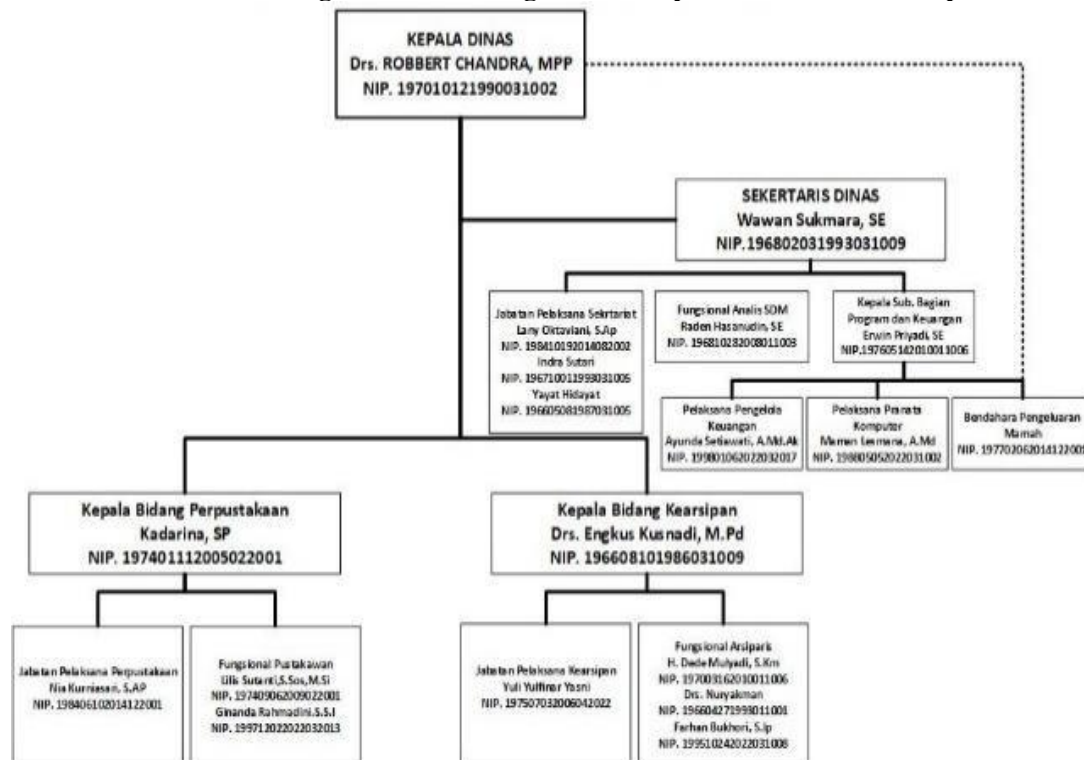
7. Menyelenggarakan dan mengembangkan layanan Informasi arsip dan Perpustakaan Umum.

4.3. Struktur Organisasi Perusahaan

Sebagai Dinas yang ditetapkan pada kategori type A dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi sebagaimana disebutkan di atas, Dispusar Kabupaten Lebak memiliki struktur organisasi, sedangkan rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kearsipan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Arsip; dan
 2. Seksi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.
- d. Bidang Perpustakaan, terdiri dari:
 1. Seksi Layanan Perpustakaan; dan
 2. Seksi Pembinaan Perpustakaan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4.3. Bagan Struktur Organisasi Perpustakaan dan Kearsipan



Sumber: Data Dispusar Kabupaten Lebak (2025).

4.4. Tugas Pokok dan Fungsi Dispusar Kabupaten Lebak

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menjalankan tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang urusan kearsipan dan bidang urusan perpustakaan. Dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut, Dispusar Kabupaten Lebak mempunyai lima fungsi, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Kearsipan dan Perpustakaan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang Kearsipan dan Perpustakaan.
3. Pengawasan dan pembinaan tugas bidang Kearsipan dan Perpustakaan.
4. Pengelolaan administrasi kesekretariatan, dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.5. Kepegawaian

Daftar nama pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Nama Kepegawaian Dispusar Kabupaten Lebak

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN
1	Drs. Robert Chandra, MPP	Kepala Dinas
2	Wawan Sukmara Wildarana, S.E	Sekretaris
3	Kadarina, S.P., M.Si	Kepala Bidang Perpustakaan
4	H.Dede Mulyadi, SKM	Fungsional Arsiparis Muda
5	Raden Hasanudin, S.E	Analisis Kepegawaian
6	Erwin Priyadi, S.E	Kasubag Umum dan Keuangan
7	Lilis Susanti, S.Sos., M.Si	Fungsional Pustakawan Muda

8	Lanny Oktaviani Tarmizi	Fungsional Umum
9	Indra Sutari	Arsiparis Pelaksana
10	Yuli Yulpinar	Arsiparis
11	Nia Kuarniasari	Fungsional Umum
12	Marnah	Fungsional Umum
13	Reni Yunita, S.E	Operator SIPKD
14	Ginanda Rahmadini, S.SI	Pustakawan
15	Ayunda	Fungsional Umum
16	Maman Lasmana	Fungsional Umum
17	Farhan	Arsiparis
18	Fatmawati	Pemilihan Arsip
19	Neneng Reta M	Pelayanan Perpustakaan
20	Yona Pranata	Operator Komputer
21	Laeliah	Operator Komputer
22	Ardi Moch Baridi	Teknisi/Supir Perpustakaan
23	Deni Setiawan, S.E	Pemilihan Arsip
24	Reffi Esa Budiman, S.Sos	Pemilihan Arsip
25	Mulyanah A.Md	Operator Komputer
26	Ucu Oktaviani	Pemilihan Arsip
27	Septian Resno Nugraha, S.T	IT
28	Siswo Wahyono	Office Boy
29	Syahroni	Office Boy
30	Bakar Wiro Muhammad	Pengemudi
31	Rangga Priadi	Office Boy
32	Raden Edi Maulana Hidayat	Keamanan
33	Arif Munandar	Pengemudi
34	Edi Junaedi	Keamanan
35	Insan Fajar Alif	Operator Komputer
36	Djayadi	Kebersihan Taman
37	Deni sudana	Teknisi
38	Rosita, S.Pd i	Administrasi

39	Syahrizal Fahru Rosyid, S.Hum	Pustakawan
40	Ade Darmawan, S.Kom	Operator SIKD/JIKN

Sumber: *Dispuser Kabupaten Lebak (2025)*.

4.6. Pelaksanaan Layanan Perpustakaan Saidjah Adinda

Dalam melaksanakan kegiatannya Perpustakaan Saidjah Adinda memiliki tujuh program unggulan pelayanan diantaranya layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan anak, layanan audio visual, layanan keanggotaan, layanan perpustakaan keliling, dan layanan untuk disabilitas. Pertama, layanan sirkulasi yaitu layanan peminjaman dan pengembalian buku di Perpustakaan. Sampai dengan November 2024, frekuensi peminjaman mencapai 1942 pemustaka dan 1665 eksemplar. Pemustaka yang meminjam buku wajib mengembalikan buku tepat waktu atau melakukan perpanjangan masa peminjaman apabila belum selesai membaca atau menggunakan buku tersebut. Pemustaka yang melakukan pelanggaran berupa terlambat mengembalikan buku akan diberikan sanksi berupa *suspend* (skorsing) nomor anggota untuk peminjaman buku selama jumlah hari keterlambatan. Namun begitu, pemustaka masih dapat mendapatkan layanan membaca di tempat.

Kedua, layanan referensi di Perpustakaan Saidjah Adinda dilakukan di ruangan layanan referensi dengan pustakawan yang bertugas. Di layanan referensi, pemustaka juga dapat melakukan penelusuran buku koleksi daerah Kabupaten Lebak. Ketiga, layanan anak terdiri dari layanan membaca di ruang anak, permainan edukatif, dan mendongeng. Selain itu, di ruang layanan anak juga terdapat Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang telah terstandarisasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Keempat, layanan audio visual pada pemustaka dapat menikmati tayangan film edukatif yang telah disediakan oleh Perpustakaan Saidjah Adinda. Untuk menikmati layanan ini, tidak bisa dilakukan secara perorangan melainkan harus secara rombongan dan berkirim surat terlebih dahulu. Kelima pada program layanan

keanggotaan, pemustaka dapat mendaftarkan diri menjadi anggota perpustakaan, mencetak kartu anggota perpustakaan dan melakukan perpanjangan masa keanggotaan perpustakaan.

Keenam, layanan perpustakaan keliling merupakan layanan perpustakaan bergerak yang mendatangi pemustaka. Layanan perpustakaan keliling Dispuser Kabupaten Lebak mengunjungi sekolah-sekolah baik Tingkat SD maupun SMP. Dispuser Kabupaten Lebak menjadwalkan program perpustakaan keliling dalam satu tahun ke 28 Kecamatan se Kabupaten Lebak. Perpustakaan keliling juga melayani permintaan kunjungan. Biasanya mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lingkungan Kabupaten Lebak ataupun permintaan langsung dari sekolah yang bersangkutan.

Ketujuh, layanan untuk disabilitas pada Perpustakaan Saidjah Adinda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak memiliki beberapa fasilitas untuk penyandang disabilitas diantaranya ialah akses jalur masuk untuk disabilitas dengan kursi roda dan koleksi buku *braille* untuk penyandang disabilitas Netra. Koleksi buku *Braille* adalah kumpulan bahan pustaka yang ditulis menggunakan sistem tulisan *Braille*, yang dirancang untuk dibaca oleh penyandang tunanetra. Koleksi ini dapat berupa buku, majalah, atau materi lain yang dicetak dalam huruf *Braille*.

4.7. Temuan dan Analisis Data Implementasi Inlislite dalam Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan Saidjah Adinda Kabupaten Lebak

Implementasi Inlislite dalam Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan Saidjah Adinda Kabupaten Lebak dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori utama menurut Edward III (1980) dalam Subarsono (2022:90). Menurut teori tersebut ada empat variabel implementasi kebijakan publik yaitu (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi pelaksana, dan (4) struktur organisasi.

Setelah dilakukan interpretasi data dan analisis data dalam penelitian ini, maka akan diperoleh gambaran mengenai implementasi kebijakan Inlislite dalam

meningkatkan pelayanan perpustakaan Saidjah Adinda Kabupaten Lebak. Dengan demikian akan terlihat output yang diinginkan terkait terlaksananya Inlislite dalam pelayanan perpustakaan Saidjah Adinda Kabupaten Lebak.

A. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Inlislite

Komunikasi dalam implementasi kebijakan layanan digital perpustakaan menjadi aspek kunci sebagaimana diuraikan oleh Edward III, yakni berkaitan dengan sejauh mana informasi mengenai kebijakan, prosedur, dan manfaat layanan dapat dipahami serta diterima oleh semua aktor pelaksana maupun penerima layanan. Dalam sesi wawancara, Kepala Dinas menyampaikan:

“Kami sebenarnya sudah mencoba menyampaikan pentingnya layanan digital, tetapi memang belum banyak masyarakat yang tahu. Salah satu hambatannya karena belum semua warga familiar dengan istilah atau cara pakainya. Kami akui sosialisasinya masih terbatas, biasanya hanya melalui acara tertentu atau kegiatan seremonial, belum menyeluruh”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Perpustakaan, Robert Chandra, INLIS001, Pada 1 Agustus 2025)

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa Kepala Dinas menyadari pentingnya komunikasi kebijakan namun mengakui masih lemahnya cakupan dan keberlanjutan dari sosialisasi yang dilakukan. Informasi belum menjangkau masyarakat secara luas dan konsisten.

Kepala Bidang Layanan menjelaskan bentuk konkret sosialisasi yang pernah dilakukan:

“Biasanya kami kasih tahu pengunjung pas mereka datang langsung ke perpustakaan. Kalau ada event seperti pelatihan atau seminar, kadang kita sisipkan materi soal layanan digital. Tapi ya nggak rutin, dan belum semua pengunjung bisa ikut”. (Wawancara

dengan Kepala Bidang Perpustakaan: Kadarina, S.P., M.Si, INLIS002, Pada 1 Agustus 2025).

Pernyataan ini sejalan dengan Kepala Dinas, yang menunjukkan bahwa penyampaian informasi dilakukan dalam konteks yang terbatas dan tidak sistematis. Edukasi kepada masyarakat dilakukan insidental, bukan melalui kanal komunikasi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Sebagai pihak teknis, pengelola IT menjelaskan bahwa sosialisasi tidak hanya sebatas pemberitahuan, tetapi juga menyangkut pendampingan:

“Kita pernah bantu lewat panduan singkat atau penjelasan langsung. Tetapi tetap aja banyak pengunjung bingung, terutama yang nggak biasa buka komputer. Yang paling sering dikeluhkan tuh bingung login, atau nggak ngerti cara cari buku digital. Mereka juga kadang takut tanya”. (Wawancara dengan *Pengelola IT Perpustakaan*: Septian Resno Nugroho, INLIS003, Pada 4 Agustus 2025)

Pernyataan ini sejalan dengan dua informan sebelumnya bahwa informasi yang diberikan belum menjangkau aspek pemahaman praktis. Meskipun telah ada usaha dari sisi teknis, komunikasi yang bersifat partisipatif dan dua arah masih kurang maksimal.

Kemudian pengunjung sebagai perpustakaan pertama memberikan penjelasan:

“Saya belum pernah dijelasin sih, waktu datang ya langsung tanya ke petugas, itu pun kalau ada. Biasanya saya bingung sendiri dulu. Nggak ada brosur atau petunjuk. Saya utak atik aja sendiri dalam mencari referensi”. (Wawancara dengan pengunjung perpustakaan: Ahmad Aji, INLIS004, Pada 4 Agustus 2025)

Setelah itu pengunjung perpustakaan kedua memberikan penjelasan:

“Pernah sih dijelasin dikit pas ikut pelatihan, tapi itu juga udah lama. Selebihnya ya saya cari-cari sendiri aja. Kalau enggak ngerti, kadang nanya ke teman”. (Wawancara dengan pengunjung perpustakaan: Nizar Fahmi, INLIS005, Pada 5 Agustus 2025)

Jawaban pengunjung kedua ini berbeda dengan pengunjung pertama. Artinya, akses informasi ternyata bersifat tidak merata. Ada yang pernah mendapat informasi (meskipun terbatas), tetapi ada pula yang sama sekali tidak pernah dijelaskan.

Lebih lanjut pengunjung perpustakaan ketiga menjelaskan:

“Belum pernah dapet penjelasan. Cuma lihat ada tulisan ‘layanan digital’, tapi saya kira itu cuma buat pegawai. Nggak ngerti juga maksudnya gimana. Manual aja dalam mencari buku yang diinginkan”. (Wawancara dengan pengunjung perpustakaan: Imam Hanafi, INLIS006, Pada 5 Agustus 2025).

Jawaban ini sejalan dengan pengunjung pertama, menandakan bahwa komunikasi visual yang tersedia tidak cukup menjelaskan fungsi atau manfaat layanan digital.

Dalam kesempatan yang sama pengunjung perpustakaan keempat menyempatkan memberikan penjelasan: “Saya tahu dari sosial media, tetapi infonya nggak lengkap. Cuma bilang ada layanan digital, tetapi nggak diajarin caranya. Saya juga agak malas nanya ke petugas karena kadang mereka sibuk sendiri”. (Wawancara dengan pengunjung Perpustakaan: Rosita, INLIS007, Pada 6 Agustus 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada media komunikasi (sosial media), namun substansi pesan yang disampaikan belum cukup edukatif atau bersifat instruksional. Ini sejalan dengan pengelola IT yang menyebut pengunjung bingung dan takut bertanya.

Terakhir, untuk mendalaminya pengunjung perpustakaan kelima menjelaskan:

“Saya tahunya dari teman, bukan dari pihak perpustakaan. Jadi semacam info dari mulut ke mulut. Kalau nanya ke petugas juga kadang jawabnya singkat banget, nggak jelas”. (Wawancara dengan pengunjung Perpustakaan: Muhammad Evan, INLIS008, Pada 6 Agustus 2025)

Jawaban ini berbeda, karena sumber informasi yang diterima berasal dari pihak ketiga (rekan atau sesama pengguna), bukan dari institusi. Ini mengindikasikan lemahnya komunikasi resmi dari pihak penyelenggara layanan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap delapan informan yang terdiri dari pihak pelaksana (Kepala Dinas, Kepala Bidang, IT) dan penerima layanan (pengunjung), dapat disimpulkan bahwa implementasi komunikasi dalam layanan digital perpustakaan masih belum optimal.

Mengacu pada teori Edward III, komunikasi yang efektif mencakup transmisi informasi yang akurat, konsisten, serta mudah dipahami oleh pelaksana dan sasaran kebijakan. Namun, dalam konteks ini:

1. Isi komunikasi masih bersifat umum dan tidak aplikatif. Banyak pengguna tidak memahami bagaimana mengakses layanan digital karena kurangnya materi yang mendidik, baik secara verbal maupun visual.
2. Saluran komunikasi terbatas pada acara formal dan komunikasi lisan yang insidental, tanpa dukungan kanal informasi digital yang aktif dan informatif.
3. Konsistensi komunikasi rendah, terbukti dari pengalaman berbeda antar pengunjung. Sebagian menerima informasi, sebagian tidak sama sekali, bahkan muncul kesan bahwa layanan digital hanya untuk kalangan internal.
4. Arah komunikasi masih satu arah. Pengunjung kesulitan untuk mengakses informasi dan juga ragu untuk bertanya karena keterbatasan pendampingan.

Dengan demikian, hambatan dalam komunikasi menjadi salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan digitalisasi perpustakaan. Kurangnya strategi komunikasi yang menyeluruh menyebabkan gap antara potensi layanan digital dengan pemanfaatan aktual oleh masyarakat.

Implikasi dari kelemahan ini tidak hanya berdampak pada efektivitas program digitalisasi, tetapi juga memperkuat kesenjangan digital dan memperlambat transformasi budaya literasi digital di tingkat lokal. Oleh karena itu, perbaikan dalam strategi komunikasi harus menjadi prioritas, dengan pendekatan multikanal (multi-channel), berbasis kebutuhan pengguna (user-oriented), dan dilengkapi dengan komunikasi partisipatif yang mempermudah masyarakat untuk belajar dan beradaptasi dengan layanan digital perpustakaan.

B. Temuan Lapangan Berdasarkan Variabel Sumberdaya

Dalam perspektif Edward III, *Sumberdaya* merupakan salah satu variabel utama yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai baik berupa infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak, maupun SDM maka kebijakan yang telah dirancang dengan baik pun akan sulit diimplementasikan secara optimal.

Saat ditanya mengenai penyebab utama keterbatasan infrastruktur teknologi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menjelaskan:

“Masalah utamanya ya anggaran. Jadi kita belum bisa penuhi semua kebutuhan perangkat. Internet juga kadang bermasalah karena jaringan di daerah kita belum stabil. Kami sangat bergantung pada koneksi dari luar”. (Wawancara dengan Kepala Dinas

Perpustakaan: Robert Chandra, INLIS001, Pada 1 Agustus 2025).

Selain itu juga Kadispusar Kabupaten Lebak ketika memaparkan anggaran dalam pemeliharaan website maupun Inlislite serta menjelaskan tentang anggaran tersebut memenuhi kebutuhan dalam peningkatan Inlislite Ia menyampaikan bahwa:

“Anggaran pemeliharaan website termasuk Inlislite yang digelontarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak yaitu Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan atau Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) dalam satu tahun untuk Perpustakaan Saidjah Adinda Kabupaten Lebak. Anggaran tersebut cukup untuk pemeliharaan namun masih belum optimal dalam peningkatan SDM termasuk staf maupun pegawai dibidang Inlislite. Hal itu dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Semoga tahun depan bisa diupayakan untuk peningkatan SDM baik staf maupun pegawai yang mengelola bidang Inlislite”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Perpustakaan: Robert Chandra, INLIS001, Pada 1 Agustus 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa anggaran pemeliharaan website maupun Inlislite dirasa sudah cukup. Namun Anggaran belum optimal hal itu dapat dilihat dari Gambar 4.4 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dispusar Kabupaten Lebak Tahun 2025, adanya efisiensi anggaran dan keterbatasan anggaran ini menjadi akar permasalahan dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur serta optimalisasi peningkatan SDM termasuk staf maupun pegawai dibidang Inlislite. Selain itu, kendala geografis atau teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil turut menjadi tantangan dalam pengembangan layanan digital.

Gambar 4.4 Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dispusar Kabupaten Lebak Tahun 2025

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggandaan	1050	Lembar	300,00	0 %	Rp. 317.700,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggandaan	2	Lembar	500,00	0 %	Rp. 1.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.999.999,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.999.999,00
5.1.02.02.01.0003	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 6.999.999,00
	[#] Belanja Pemeliharaan TIK Pendukung Layanan Digital Perpustakaan Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan					Rp. 6.999.999,00
	[-] Belanja Pemeliharaan TIK Pendukung Layanan Digital Perpustakaan					Rp. 6.999.999,00
	Pemeliharaan Website Spesifikasi : Hosting web	12	Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 31.481.450,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 31.481.450,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 25.641.450,00
	[#] Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Dextra Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan					Rp. 4.641.450,00
	[-] Belanja Bahan bakar Minyak/Gas dan Pelumas Dextra					Rp. 4.641.450,00
	Bahan Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Dextra	319	Liter	14.500,00	0 %	Rp. 4.641.450,00
	[#] Belanja Pemeliharaan dan Operasional Mobil Perpustakaan Keliling Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan					Rp. 21.000.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan dan Operasional Mobil Perpustakaan Keliling					Rp. 21.000.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Spesifikasi : Roda 4	1 x 1	Kendaraan Tahun	21.000.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 5.840.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana layanan Perpustakaan Lainnya Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan					Rp. 5.840.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana layanan Perpustakaan Lainnya					Rp. 5.840.000,00
	pemeliharaan Personal Computer / Notebook Spesifikasi : pemeliharaan Personal Computer/Notebook	8 x 1	Buah Tahun	730.000,00	0 %	Rp. 5.840.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 43.540.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 43.540.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 15.330.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DKI Jakarta Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan					Rp. 9.360.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DKI Jakarta					Rp. 9.360.000,00
	Biaya Transportasi Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA	1 x 3	Kendaraan Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : DKI JAKARTA	4 x 3	Orang Kali	530.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Provinsi Banten Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan					Rp. 6.170.000,00

Sumber: Dispusar Kabupaten Lebak (2025)

Kepala Bidang Layanan memaparkan bentuk kendala teknis yang paling sering dihadapi:

“Paling sering sih jaringan internet yang lambat atau tiba-tiba putus. Selain itu, beberapa komputer juga sering eror karena sudah lama. Kalau software, kita pakai Inlislite, tetapi kadang juga lambat responnya”. (Wawancara dengan Kepala Bidang Perpustakaan: Kadarina, S.P., M.Si, INLIS002, Pada 1 Agustus 2025).

Pernyataan ini sejalan dengan Kepala Dinas bahwa masalah utama berada pada kualitas jaringan dan kondisi perangkat keras yang tidak ideal. Komponen teknologi yang tersedia tidak lagi memadai untuk mendukung operasional sistem digital secara efisien.

Sebagai pihak yang paling dekat dengan perangkat teknologi, pengelola

IT Perpustakaan Saidjah Adinda menjelaskan:

“Perangkat yang ada sekarang itu ada sekitar 6 unit komputer, tetapi yang benar-benar lancar hanya 3 komputer. Sisanya sering ngehang. Internet juga kadang naik-turun. Kekurangan utama menurut saya, ya bandwidth-nya kecil dan server kita bukan server mandiri”. (Wawancara dengan Pengelola IT Perpustakaan: Septian Resno Nugraha, INLIS003, Pada 4 Agustus 2025)

Informasi ini menguatkan temuan sebelumnya, bahwa keterbatasan sumber daya meliputi kuantitas perangkat keras (komputer), kualitas jaringan internet, dan absennya infrastruktur yang memadai seperti server lokal. Ketiadaan server mandiri menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap layanan eksternal, yang

memperbesar risiko gangguan operasional.

“Pernah beberapa kali sih, pas mau menggunakan komputer, internetnya lemot banget. Pernah juga komputernya enggak bisa nyala atau ngeblank. Sehingga kami dalam mencari data secara manual saja”. (Wawancara dengan Pengunjung pertama Perpustakaan: Ahmad Aji, INLIS004, Pada 4 Agustus 2025)

“Iya, biasanya internet lambat, jadi pas buka situs layanan digital tuh lama banget. Pernah juga komputer nge-freeze”. (Wawancara dengan Pengunjung kedua Perpustakaan: Nizar Fahmi, INLIS005, Pada 5 Agustus 2025)

“Sering sih saya ngalamin, apalagi kalau siang, kayaknya banyak yang pakai jadi makin lemot. Pernah juga aplikasi Inlislite-nya enggak bisa dibuka”. (Wawancara dengan Pengunjung ketiga Perpustakaan: Imam Hanafi, INLIS006, Pada 5 Agustus 2025)

“Pernah banget. Saya kira cuma saya aja yang ngalamin lemot dan gangguan dalam akses digital. Ditambah lagi komputernya udah lemot, terus internetnya kayak putus-putus gitu”. (Wawancara dengan Pengunjung keempat Perpustakaan: Rosita, INLIS007, Pada 6 Agustus 2025)

“Iya, kadang internetnya hilang, kadang juga komputernya lama banget nyala. Jadi kadang saya malas ngulang lagi dan milih enggak pakai layanan digital. Lebih praktis manual untuk mencari referensi buku dan lainnya”. (Wawancara dengan Pengunjung kelima Perpustakaan: Muhammad Evan, INLIS008, Pada 6 Agustus 2025)

Pernyataan dari seluruh pengunjung perpustakaan sejalan satu sama lain. Mereka semua pernah mengalami kendala ketika menggunakan fasilitas digital, baik berupa koneksi

internet yang tidak stabil, perangkat keras yang lambat atau tidak berfungsi, serta gangguan teknis lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi pengguna, layanan digital belum dapat memenuhi ekspektasi kenyamanan dan keandalan layanan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para informan pelaksana dan pengguna, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh perpustakaan dalam mendukung implementasi layanan digital masih sangat terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan operasional secara optimal.

Analisis terhadap kondisi sumber daya ini mencakup beberapa poin krusial:

1. Keterbatasan Anggaran menjadi faktor utama yang memengaruhi kemampuan institusi dalam menyediakan infrastruktur yang memadai. Tanpa dana yang cukup, pengadaan perangkat keras, peningkatan bandwidth internet, maupun pemeliharaan sistem menjadi terhambat.
2. Kualitas Perangkat Teknologi sebagian besar berada dalam kondisi kurang optimal. Komputer yang tersedia sebagian besar merupakan perangkat lama yang sering mengalami gangguan teknis. Hal ini mengganggu efisiensi dan kenyamanan layanan digital.
3. Konektivitas Internet yang tidak stabil menjadi kendala paling dominan, sebagaimana dikeluhkan oleh hampir seluruh informan. Hal ini diperparah oleh keterbatasan bandwidth dan tidak adanya sistem jaringan internal seperti server lokal.
4. Ketergantungan terhadap Infrastruktur Eksternal seperti koneksi internet umum dan hosting sistem Inlislite, menyebabkan kurangnya kontrol atas keberlangsungan layanan digital.

Dalam kerangka teori Edward III, kelemahan pada variabel sumber daya akan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Tanpa dukungan infrastruktur yang solid, maka

strategi komunikasi, disposisi pelaksana, hingga desain organisasi sekalipun tidak akan berjalan efektif.

Lebih jauh, kekurangan sumber daya ini bukan hanya berdampak teknis, namun juga memperburuk kepercayaan pengguna terhadap kualitas layanan digital. Hal ini akan memperlemah tingkat adopsi teknologi, serta memperlambat proses digitalisasi pelayanan publik di sektor perpustakaan.

Oleh karena itu, perlu adanya intervensi kebijakan yang fokus pada penguatan sumber daya, melalui alokasi anggaran yang proporsional, peningkatan kapasitas teknis SDM dan infrastruktur, serta pengembangan jaringan kerja sama dengan pihak luar seperti penyedia layanan IT dan institusi donor untuk membangun sistem layanan digital yang lebih tangguh dan inklusif.

C. Temuan Lapangan Berdasarkan Variabel Disposisi Pelaksana

Dalam perspektif Edward III, *Disposisi* pelaksana berkaitan dengan sikap, motivasi, dan kesiapan individu atau kelompok dalam menjalankan kebijakan. Jika pelaksana memiliki sikap yang positif dan proaktif, maka kebijakan lebih berpotensi diimplementasikan secara efektif. Sebaliknya, jika pelaksana pasif atau kurang yakin, maka pelaksanaan kebijakan akan mengalami banyak hambatan, bahkan jika komunikasi dan sumber daya sudah tersedia.

Saat dimintai pendapat mengenai rendahnya literasi digital masyarakat, Kepala Dinas menyampaikan:

“Memang benar, banyak masyarakat belum terbiasa dengan teknologi. Itu jadi tantangan besar buat kami. Tetapi kami terus mendorong staf untuk tetap sabar mendampingi, walaupun kadang ada juga staf yang merasa frustrasi karena harus menjelaskan hal yang sama berulang-ulang”.

(Wawancara dengan *Kepala Dinas Perpustakaan*: Robert Chandra, INLIS001, Pada 1 Agustus 2025).

Pernyataan ini menggambarkan adanya kesadaran dan sikap empati dari pimpinan terhadap kondisi literasi digital masyarakat. Namun, juga tersirat adanya tekanan pada staf karena beban mendampingi pengguna dengan kemampuan digital yang minim.

Kepala Bidang menilai bahwa kesulitan pengunjung sebagian besar berasal dari kurangnya pemahaman terhadap dasar-dasar penggunaan sistem digital:

“Kalau saya lihat, pengunjung itu bukan malas, tetapi memang belum ngerti caranya. Banyak yang belum terbiasa pakai komputer. Jadi pas disuruh buka OPAC atau cari e-book, mereka bingung. Kadang mereka kira OPAC itu cuma buat petugas”. (Wawancara dengan Kepala Bidang Perpustakaan: Kadarina, S.P., M.Si, INLIS002, Pada 1 Agustus 2025).

Pernyataan ini sejalan dengan Kepala Dinas, bahwa ada kesadaran dari pelaksana mengenai keterbatasan pengetahuan digital masyarakat. Namun, juga terlihat bahwa belum ada sistem pendampingan yang memadai untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Pengelola IT menjelaskan bahwa sebagian besar pengunjung mengalami kesulitan teknis dasar:

“Yang sering mereka keluhkan tuh, enggak ngerti harus masuk dari mana. Kadang salah klik, terus bingung harus ngapain. Kita udah coba buat panduan, tetapi mungkin masih kurang jelas atau mereka males untuk membaca. Kita sih bantu sebisa mungkin, tetapi kalau ramai ya nggak ke-handle semua”. (Wawancara dengan Pengelola IT Perpustakaan: Septian Resno Nugraha, INLIS003, Pada 4 Agustus 2025)

Pernyataan ini sejalan dengan dua informan sebelumnya. Sikap pelaksana dalam hal ini pengelola IT cenderung membantu, tetapi ada keterbatasan dari sisi kapasitas dan beban kerja, yang berdampak pada efektivitas pendampingan pengguna.

“Saya kesulitan waktu buka OPAC, enggak tahu harus klik yang mana. Udah nanya sih, tetapi petugasnya lagi sibuk. Jadi saya coba sendiri, ujungnya malah makin bingung dalam penggunaan aplikasi ini”. (Wawancara dengan Pengunjung Perpustakaan Pertama: Ahmad Aji, INLIS004, Pada 4 Agustus 2025)

“Waktu nyari e-book, saya enggak ngerti gimana loginnya. Pas tanya ke teman, katanya harus buat akun dulu, tetapi saya enggak ngerti caranya. Jadinya saya batal pakai”. (Wawancara dengan Pengunjung Perpustakaan kedua: Nizar Fahmi, INLIS005, Pada 5 Agustus 2025)

“Pernah pakai OPAC, tetapi enggak nemu buku yang saya cari. Kayaknya karena saya salah ngetik atau formatnya enggak pas. Saya juga enggak tahu gimana caranya pakai kata kunci yang benar. Apalagi Ketika dibantu pun sama, enggak ketemu juga referensi yang saya minta”. (Wawancara dengan Pengunjung Perpustakaan ketiga: Imam Hanafi, INLIS006, Pada 5 Agustus 2025)

“Susahnya pas buka aplikasi peminjaman, tampilannya bikin bingung. Saya udah coba-coba tapi malah keluar sendiri aplikasinya. Nggak ngerti juga kenapa”. (Wawancara dengan Pengunjung Perpustakaan keempat: Rosita, INLIS007, Pada 6 Agustus 2025)

“Saya tuh gaptek, jadi ya susah. Pas tanya ke petugas, jawabannya cepet banget, saya enggak sempat ngerti. Harusnya dijelasin pelan-pelan dan bisa memudahkan kami bagi pemustaka dalam mencari referensi buku yang kami inginkan”. (Wawancara dengan Pengunjung Perpustakaan kelima: Muhammad Evan, INLIS008, Pada 6 Agustus 2025)

Pernyataan para pengunjung perpustakaan sejalan, mereka sama-sama mengalami kesulitan saat mengakses layanan digital karena tidak memahami sistem, format, maupun prosedur penggunaan. Selain itu, pendampingan dari pelaksana masih dirasakan kurang, baik dari sisi waktu, kedalaman penjelasan, maupun pendekatan komunikatif.

Dari hasil wawancara terhadap pelaksana dan pengguna layanan perpustakaan, dapat ditarik beberapa poin penting terkait variabel disposisi:

1. Sikap Pelaksana Relatif Positif dan Mendukung, terlihat dari pernyataan Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Pengelola IT yang menyadari kondisi pengguna dan berusaha mendampingi mereka, meskipun dengan keterbatasan. Artinya, secara psikologis dan moral, pelaksana tidak menolak digitalisasi dan berupaya menjalankan kebijakan.
2. Tingkat Kepedulian Sudah Ada, Tapi Belum Sistematis. Misalnya, tidak semua pelaksana bisa melayani secara menyeluruh karena keterbatasan waktu dan tenaga. Selain itu, tidak semua staf memiliki keterampilan pedagogis untuk menjelaskan teknologi kepada pengguna awam secara sabar dan komunikatif.
3. Ketidaksiapan Psikososial Pengguna masih menjadi hambatan. Pengunjung cenderung merasa tidak percaya diri, bingung, bahkan takut salah saat mencoba layanan digital. Hal ini diperburuk dengan respons pelaksana yang terkadang terlalu singkat atau kurang empatik, sehingga memperbesar jarak psikologis antara pelaksana dan pengguna.
4. Tidak Ada Prosedur Standar dalam Pendampingan Digital. Ini menjadi kelemahan dari sisi disposisi kelembagaan. Meskipun pelaksana individual punya sikap positif, tidak didukung oleh sistem pelatihan atau SOP yang memastikan setiap pengunjung mendapatkan pengalaman pendampingan yang setara.

Dalam konteks teori Edward III, kelemahan pada disposisi akan melemahkan pelaksanaan kebijakan, meskipun komunikasi dan sumber daya tersedia. Di sini, sikap pelaksana yang belum sepenuhnya adaptif, ditambah dengan pendekatan pelayanan yang belum humanis dan berbasis literasi digital rendah, menjadi penghambat utama keberhasilan layanan digital perpustakaan.

Agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif, perlu adanya peningkatan kapasitas pelaksana dalam bentuk pelatihan pendekatan komunikatif untuk melayani masyarakat dengan literasi digital rendah, serta sistem rotasi staf atau SOP yang memastikan setiap pengguna mendapatkan pendampingan yang cukup saat menggunakan layanan digital.

D. Temuan Lapangan Berdasarkan Variabel Struktur Organisasi

Menurut Edward III, *struktur organisasi* berperan penting dalam memastikan kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Struktur organisasi yang jelas, alur kerja yang terdefinisi, dan koordinasi antar bagian yang efisien sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam konteks digitalisasi layanan perpustakaan.

Menjawab pertanyaan mengenai kesesuaian struktur organisasi dan alur kerja terhadap implementasi digitalisasi, Kepala Dinas menyatakan:

“Secara struktur, kami memang belum punya divisi khusus yang menangani digitalisasi. Masih mengandalkan bidang layanan dan IT yang sudah ada. Jadi kadang tugas-tugasnya saling tumpang tindih. Ini memang jadi tantangan, karena digitalisasi butuh perhatian khusus”. (Wawancara dengan *Kepala Dinas Perpustakaan*: Robert Chandra, INLIS001, Pada 1 Agustus 2025).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa struktur organisasi saat ini belum secara eksplisit mendukung digitalisasi

sebagai program prioritas. Ketiadaan unit atau sub-unit yang khusus menangani program digitalisasi membuat pelaksanaannya terpecah dalam beberapa bidang yang belum tentu punya kapasitas dan otoritas penuh.

Terkait koordinasi dan kejelasan prosedur, Kepala Bidang Layanan menyampaikan:

“Kami sudah coba bentuk tim kecil lintas bidang, tapi koordinasinya belum optimal. Kadang antar staf belum paham perannya. SOP-nya juga belum diperbarui untuk layanan digital, jadi masih pakai pola lama”. (Wawancara dengan Kepala Bidang Perpustakaan: Kadarina, S.P., M.Si, INLIS002, Pada 1 Agustus 2025).

Pernyataan ini sejalan dengan Kepala Dinas, menunjukkan adanya ketidakjelasan peran dan tanggung jawab antar bidang. Ketiadaan prosedur operasional standar (SOP) khusus untuk layanan digital menjadi kendala utama dalam penguatan koordinasi.

Sebagai pihak teknis, Pengelola IT Perpustakaan Saidjah Adinda memberikan gambaran operasional di lapangan:

“Kalau ada masalah teknis, biasanya dilaporkan langsung ke saya. Tetapi enggak ada sistem laporan tertulis. Kadang saya tahu dari mulut ke mulut, atau baru bertindak kalau pengunjung mengeluh. Jadi ya kadang terlambat juga. Belum ada sistem pelaporan resmi atau pelaporan yang berbasis dokumentasi sesuai aturan”. (Wawancara dengan Pengelola IT Perpustakaan: Septian Resno Nugraha, INLIS003, Pada 4 Agustus 2025)

Pernyataan ini menguatkan kedua informan sebelumnya, bahwa mekanisme kerja organisasi belum didukung sistem formal yang responsif, seperti sistem pelaporan berbasis tiket atau dokumentasi teknis. Alur komunikasi dan penanganan kendala masih informal dan bergantung pada inisiatif individu.

Hasil wawancara terhadap tiga aktor pelaksana menunjukkan bahwa implementasi program digitalisasi layanan perpustakaan menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Adapun analisis mendalamnya sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Belum Mengakomodasi Fungsi Digitalisasi secara Spesifik. Ketiadaan unit atau jabatan struktural khusus menyebabkan tidak adanya otoritas dan fokus yang kuat dalam pelaksanaan program digitalisasi.
2. Koordinasi Antar Bidang Belum Efektif. Pembentukan tim kerja lintas bidang belum diikuti dengan kejelasan peran, pembagian tugas, dan SOP yang adaptif terhadap perubahan digital. Hal ini menciptakan kebingungan dan potensi tumpang tindih tugas.
3. Sistem Pelaporan dan Penanganan Masalah Belum Formal. Pengelolaan kendala teknis masih dilakukan secara reaktif dan informal. Ketiadaan sistem pelaporan resmi menimbulkan keterlambatan dalam penanganan masalah, serta membuat evaluasi sulit dilakukan secara sistematis.
4. Kelemahan Tata Kelola Organisasi Menurunkan Efektivitas Implementasi. Ketidakjelasan struktur, prosedur, dan tanggung jawab membuat pelaksana cenderung bekerja berdasarkan inisiatif pribadi daripada panduan organisasi yang baku.

Dalam kerangka teori Edward III, lemahnya struktur organisasi merupakan hambatan sistemik yang akan memengaruhi seluruh proses implementasi. Tanpa struktur yang jelas dan prosedur kerja yang efektif, maka komunikasi, sumber daya, dan sikap pelaksana yang baik pun akan sulit terwujud secara optimal dalam pelaksanaan kebijakan digitalisasi.

4.8. Interpretasi Data

Berdasarkan hasil penelitian lapangan terhadap implementasi kebijakan digitalisasi layanan perpustakaan dengan menggunakan teori

Edward III, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

A. Komunikasi

Komunikasi kebijakan belum berjalan efektif. Informasi mengenai layanan digital belum disampaikan secara menyeluruh, konsisten, dan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna. Saluran komunikasi terbatas dan lebih bersifat satu arah, tanpa adanya sistem komunikasi dua arah yang memberi ruang bagi pengguna untuk memperoleh pemahaman dan pendampingan.

B. Sumber Daya

Sumber daya yang tersedia, khususnya infrastruktur teknologi dan jaringan internet, masih sangat terbatas. Perangkat keras tidak memadai, koneksi internet tidak stabil, dan tidak ada server mandiri. Keterbatasan anggaran menjadi akar dari permasalahan ini. Akibatnya, layanan digital sering mengalami gangguan dan tidak mampu mendukung operasional secara optimal.

C. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Meskipun pelaksana memiliki sikap yang cukup positif dan bersedia membantu pengguna, keterbatasan kapasitas, beban kerja, serta tidak adanya sistem pelatihan atau SOP pelayanan digital menyebabkan respons pelaksana menjadi kurang efektif. Kesenjangan literasi digital masyarakat tidak dibarengi dengan pendekatan pelayanan yang ramah, sabar, dan edukatif.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dinas belum disesuaikan dengan kebutuhan era digital. Tidak ada unit khusus yang menangani digitalisasi, koordinasi antar bidang masih lemah, dan SOP belum diadaptasi untuk mendukung layanan digital. Penanganan kendala teknis tidak dilakukan melalui sistem formal, melainkan bersifat insidental dan informal.

Temuan ini menunjukkan bahwa kegagalan atau keterbatasan dalam implementasi kebijakan digitalisasi perpustakaan bukan semata-mata akibat

lemahnya literasi digital masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh lemahnya sistem internal, termasuk komunikasi kebijakan, dukungan sumber daya, kesiapan pelaksana, dan struktur organisasi.

Untuk itu, strategi perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh melalui:

1. Penguatan komunikasi kebijakan berbasis edukasi digital.
2. Pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi secara bertahap dan terencana.
3. Pelatihan intensif bagi pelaksana tentang pelayanan berbasis digital.
4. Reformasi struktur organisasi yang mengakomodasi fungsi digitalisasi secara khusus.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Inlislite dalam Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan Saidjah Adinda Kabupaten Lebak, pada variabel Komunikasi antara pelaksana dan pemustaka sudah berjalan cukup baik, namun masih bersifat satu arah. Informasi mengenai penggunaan aplikasi Inlislite belum disosialisasikan secara menyeluruh. Komunikasi internal antar pegawai juga masih bergantung pada arahan atasan dan belum didukung oleh sistem informasi manajemen yang kuat. Pada variabel Sumber Daya merupakan tantangan utama dalam

implementasi Inlislite. Terutama terkait keterbatasan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang kurang stabil, perangkat komputer yang terbatas, serta keterampilan staf yang masih terbatas dalam aspek digitalisasi. Selain itu, rendahnya literasi digital pemustaka menyebabkan rendahnya partisipasi dalam pemanfaatan layanan berbasis Inlislite. Pada variabel Disposisi (Sikap Pelaksana) menunjukkan bahwa sebagian besar staf memiliki komitmen dan kemauan untuk menjalankan pelayanan berbasis Inlislite. Namun, keterbatasan kapasitas teknis menghambat efektivitas mereka dalam membantu pengguna. Staf cenderung reaktif terhadap kendala teknis dan belum memiliki sistem pendampingan pengguna secara optimal. Terakhir pada variabel Struktur Birokrasi dalam pengelolaan perpustakaan masih tergolong sederhana dan kurang mendukung optimalisasi inovasi digital. Belum ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang baku terkait layanan digital, sehingga pelaksanaan masih berjalan berdasarkan kebiasaan dan inisiatif individual staf. Secara keseluruhan, implementasi Inlislite di Perpustakaan Saidjah Adinda telah memberikan dampak positif awal dalam sistem otomatisasi layanan, tetapi belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada tantangan struktural, sumber daya, dan budaya organisasi.

References

- A, B. S. (n.d.). *INLISLite dalam Arsitektur Aplikasi SPBE Nasional*. perpusnas.go.id. Diambil 10 Februari 2025, dari https://www.perpusnas.go.id/berita/inlislite-dalam-arsitektur-aplikasi-spbe-nasional?utm_source
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul - Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Anwar, B., Ambiyar, A., Jalinus, N., & Huda, A. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Desktop Sebagai Langkah Strategis Optimalisasi Kualitas Pendidikan. *Jurnal Saintikom (Jurnal Sains Manajemen Informatika Dan Komputer)*, 23(1), 213. <https://doi.org/10.53513/jis.v23i1.9529>

- Arifin, mariska duwi. (n.d.). *iPusnas, Solusi Ditengah Pandemi dari Perpusnas*. Kompasiana. Diambil 10 Februari 2025, dari https://www.kompasiana.com/mariskaduwiarifinputri/63a2bb9f4addee26664d2972/ipusnas-solusi-ditengah-pandemi-dari-perpusnas#google_vignette
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Indah, R. N., Syam, R. Z. A., & Aulia, U. (2021). Dampak Perubahan Sistem Otomasi Slims Ke Inlislite Di Perpustakaan SMK Negeri 9 Bandung. *Tibannbaru Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 5(1), 148. <https://doi.org/10.30742/tb.v5i1.1295>
- Indriani. (n.d.). *Perpusnas sebut pengguna layanan daring terus meningkat*. antaranews.com. Diambil 10 Februari 2025, dari <https://www.antaranews.com/berita/3102397/perpusnas-sebut-pengguna-layanan-daring-terus-meningkat>
- Linawati, A. (n.d.). *Menjangkau Masyarakat dengan Koleksi e-Resource Perpustakaan Nasional*. perpusnas.go.id. Diambil 10 Februari 2025, dari <https://www.perpusnas.go.id/berita/menjangkau-masyarakat-dengan-koleksi-e-resource-perpustakaan-nasional>
- Mulyani Sri. 2025. *Praktik Kerja Industri Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak*. Laporan, SMKN 1 Cileles.
- Nurandi. (n.d.). *Minat Baca Warga Lebak Masih Rendah, di Bawah Rata-rata Nasional*. radarbanten.co.id. Diambil 7 Maret 2025, dari https://www.radarbanten.co.id/2024/08/13/minat-baca-warga-lebak-masih-rendah-di-bawah-rata-rata-nasional/?utm_source=chatgpt.com
- Nurulauni, N., Rukmana, E. N., & Rohman, A. S. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Layanan Perpustakaan Dengan Senayan Library Management System (Slims) (Studi Kasus: Perpustakaan Pribadi “Andalus Library”). *Pustaka Karya Jurnal Ilmiah Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 10(2), 117. <https://doi.org/10.18592/pk.v10i2.5944>
- Perpustakaan, D., Kearsipan, D. A. N., & Lebak, K. (n.d.). *Perpustakaan saidjah adinda*.
- Publik, J. A., Kebijakan, I., Dan, K., Perencanaan, N., Dan, P., Daerah, K., Dinas, D., Hidup, L., Provinsi, P., Selatan, S., Service, L., & Province, S. S. (2023). *Jurnal Administrasi Publik*. 3(050), 1–9.
- Ridwanulloh, M. U. (2024). Optimalisasi Pelayanan Perpustakaan Umum Kota Kediri Setelah Pandemi Covid 19. *Abdi Pustaka Jurnal Perpustakaan Dan Kearsipan*, 4(1), 17–23. <https://doi.org/10.24821/jap.v4i1.9799>
- Raco, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Serba Serbi, T. (n.d.). *Inlislite: Pengertian, Kelebihan, dan Kekurangannya*. idcloudhost.com. Diambil 10 Februari 2025, dari https://idcloudhost.com/blog/inlislite-pengertian-kelebihan-dan-kekurangannya/?utm_source=chatgpt.com
- Susanto, E. R., Puspaningrum, A. S., Samsugi, S., Pratiwi, D., Amanda, F., & Pratama, M. T. A. (2022). Implementasi E-Library Pada Perpustakaan SMK Bina Latih Karya. *Abdi*, 4(2), 92–97. <https://doi.org/10.30604/abdi.v4i2.592>

- Statistik, B. P. (2023). *Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2023*. banten.bps.go.id. https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/1/ODUjMQ%3D%3D/indeks-pembangunan-literasi-masyarakat-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten--2023.html?utm_source=chatgpt.com
- Wilson, C. S. J., & Long, M. J. (n.d.). *British Library*. wikipedia.org. Diambil 10 Februari 2025, dari https://en.wikipedia.org/wiki/British_Library
- Zahro, F. (2023). Antara Tradisi Dan Transformasi: Pandangan Santri Terhadap Istilah Guru Dan Ustadz Di Pondok Pesantren Al Hidayah Karangploso Malang. *Aksara Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 24(2). <https://doi.org/10.23960/aksara/v24i2.p752-762>